

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN 7-5-2024
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, KEMISKINAN, DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT**



Oleh:

ADINDA ANDARISA

01021182025026

EKONOMI PEMBANGUNAN

diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS EKONOMI

2024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, KEMISKINAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT

Disusun Oleh,

Nama : Adinda Andarisa
NIM : 01021182025026
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING



Tanggal : 4 Maret 2024

Dr. Siti Rohima S.E., M.Si
NIP. 196903142014092001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, KEMISKINAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT

Disusun oleh

Nama : Adinda Andarisa
NIM : 0101182025026
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 3 April 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 3 April 2024

Ketua



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP. 196903142014092001

Anggota



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 7-5-2024
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Adinda Andarisa
NIM : 0102182025026
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

Pembimbing : Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 3 April 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri, dalam skripsi tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, 3 April 2024

Pembuat Pernyataan



Adinda Andarisa
NIM. 01021182025026

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 3-5-2024
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat” yang bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S-1) pada program studi Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Penelitian ini merupakan perjalanan intelektual yang panjang bagi penulis, diawali dari rasa keingintahuan yang dituntun oleh semangat dan pemikiran ilmiah, serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, hingga mencapai tahap terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini mungkin mungkin terdapat beberapa keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai setiap kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun dari pembaca demi perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi pijakan awal untuk penelitian yang lebih lanjut dan lebih sempurna di bidang ilmu ekonomi pembangunan.

Indralaya, 3 April 2024

Adinda Andarisa

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rasa syukur yang amat dalam dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada tim penulis berupa nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan dan juga kepada Nabi Muhammad SAW.
2. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Nangcik dan Ibu Sopiah yang tanpa henti-hentinya terus mendukung penulis dengan berbagai cara. Terima kasih atas kepercayaan, doa, dan kesabaran yang kalian berikan dalam segala situasi dan kondisi yang penulis hadapi.
3. Untuk aa' Afif, yuk Evi, cek Yan, kak Oki, cek Ton, cek Nap, cek Ci dan Cek mi selaku saudara kandung dan ipar penulis yang telah menjadi motivasi penulis dalam menjalankan perkuliahan ini dengan baik sampai selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, usaha, tulus kasih, dan doa terbaik untuk kelancaran adik bungsu nya dalam pendidikan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan akhirat atas jasa yang telah diberikan
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E selaku Dekan Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan juga selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membantu saya selama menempuh pendidikan di jenjang strata satu ini.
7. Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si sekretaris jurusan ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

8. Ibu Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, pikiran serta tenaga untuk membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Feny Marissa, S.E., M.SI selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan skripsi saya.
10. Seluruh Bapak/Ibu dosen beserta staf dan karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan membantu selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
11. Untuk teman-teman di EP UNSRI angkatan 2020 dan keluarga KSPM FE UNSRI yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih telah mengisi hari-hari penulis selama menjalani masa perkuliahan.
12. Rekan-rekan seperbimbingan Sekar, Liza, Memel, Desnico, Elisa, Nadila, Monica, Amirah serta teman teman terdekat penulis semasa sekolah Adel dan Dinda yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan tanpa henti sehingga secara tidak langsung membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
14. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri karena telah berhasil melalui proses panjang perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Maaf dan terima kasih sudah tetap ingin maju meski tertatih, selalu sabar, terus bertahan, dan mencoba terus sehat dalam setiap proses skripsi dan kedewasaan diri ini.

Indralaya, 3 April 2024
Penulis

Adinda Andarisa
NIM. 01021182025026

ABSTRAK

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, KEMISKINAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT

Oleh:

Adinda Andarisa; Siti Rohima

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data *time series* yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan DJPK Kementerian Keuangan selama 7 tahun. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM) beserta hasil analisis individu tiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara simultan, Penerimaan pajak daerah, Kemiskinan, dan Jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan pada kabupaten/kota Provinsi Papua Barat. Secara parsial Penerimaan pajak daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan pada kabupaten/kota Provinsi Papua Barat, sedangkan Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan pada kabupaten/kota Provinsi Papua Barat.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Daerah, Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Ketimpangan Pendapatan

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis., S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP. 196903142014092001

ABSTRACT

THE EFFECT OF LOCAL TAX REVENUE, POVERTY, AND POPULATION ON INCOME INEQUALITY IN DISTRICTS/CITIES OF WEST PAPUA PROVINCE

By:

Adinda Andarisa; Siti Rohima

This research aims to analyze the effect of Local Tax Revenue, Poverty, and Population on Income Inequality in Regency / City of West Papua Province. The data used in this study are secondary data in the form of time series data obtained from Central Bureau of Statistics (BPS) and DJPK of the Ministry of Finance for 7 years. The analysis technique used in this study is panel data regression using the Random Effect Model (REM) and with the results of individual analysis of each districts/cities in West Papua Province. The results revealed that simultaneously, local tax revenue, poverty, and population together have a significant effect on income inequality in the districts / cities of West Papua Province. Partially, local tax revenue has a significant negative effect on income inequality and population has a significant positive effect on income inequality in the districts/cities of West Papua Province, while poverty has no significant effect on income inequality in the districts/cities of West Papua Province.

Keywords: *Local Tax Revenue, Poverty, Population, Income Inequality*

Known by,
Head of Development Economics Departement

Advisor



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP. 196903142014092001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Adinda Andarisa
	NIM	01021182025026
	Tempat, Tanggal Lahir	Palembang, 11 Januari 2003
	Alamat	Jalan Pasundan No.138 Rt. 34 Rw. 07 Kec/Kel. Kalidoni Palembang
	Handphone	0896-78300-887
AGAMA	Islam	
JENIS KELAMIN	Perempuan	
KEWARGANEGARAAN	Indonesia (WNI)	
TINGGI BADAN	165 cm	
BERAT BADAN	54 kg	
EMAIL	Adindarisa614@gmail.com	
RIWAYAT PENDIDIKAN		
2008-2014	SD Negeri 201 Palembang	
2014-2017	SMP Negeri 29 Palembang	
2017-2020	SMA Negeri 7 Palembang	
2020-2024	Universitas Sriwijaya	
RIWAYAT ORGANISASI		
2021-2022	Anggota Divisi Media & Informasi IMEPA FE UNSRI 2021	
2022-2023	Anggota Divisi Media & Informasi KSPM FE UNSRI	
2023-2024	BPH Divisi Media & Informasi KSPM FE UNSRI 2023	

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Ketimpangan Pendapatan	13
2.1.2 Teori Penerimaan Negara.....	16
2.1.3 Teori Kemiskinan.....	20
2.1.4 Teori Kependudukan.....	21
2.1.5 Ketimpangan Pendapatan	22
2.1.6 Kemiskinan	24
2.1.7 Pajak Daerah.....	28
2.1.8 Jumlah Penduduk.....	30
2.2 Penelitian Terdahulu.....	32
2.3 Kerangka Pikir	35
2.4 Hipotesis Penelitian.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	37
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.3 Teknik Analisis Data	38
3.3.1 <i>Common Effect Model (CEM)</i>	39

3.3.2 <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	39
3.3.3 <i>Random Effect Model</i> (REM).....	40
3.4 Pemilihan Model Terbaik.....	40
3.5 Uji Hipotesis.....	42
3.5.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	42
3.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	42
3.5.3 Analisis Koefisien Determinasi.....	42
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	45
4.1.1 Kondisi Gambaran Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat.....	45
4.1.2 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan.....	47
4.1.3 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah.....	49
4.1.4 Perkembangan Kemiskinan.....	50
4.1.5 Perkembangan Jumlah Penduduk.....	52
4.2 Hasil Penelitian.....	56
4.2.1 Model Regresi Data Panel.....	56
4.2.2 Pemilihan Model Akhir.....	57
4.3 Analisis Individu.....	59
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik Regresi Data Panel.....	61
4.4.1 Uji Normalitas.....	62
4.4.2 Uji Multikolonieritas.....	62
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	63
4.5 Hasil Uji Signifikansi.....	64
4.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	64
4.5.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji-t).....	64
4.5.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	65
4.6 Pembahasan.....	66
4.6.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat.....	66
4.6.2 Pengaruh Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat.....	68
4.6.3 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat.....	70
4.6.4 Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat.....	72

BAB V PENUTUP.....	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2018-2022 (Dalam Miliar Rupiah)	9
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2018-2022 (Dalam Ribu Jiwa)	10
Tabel 4.1	Wilayah Administratif Provinsi Papua Barat	46
Tabel 4.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Provinsi Papua Barat	47
Tabel 4.3	Rasio Gini Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2022	48
Tabel 4.4	Hasil Estimasi dengan metode CEM,FEM, dan REM	56
Tabel 4.5	Hasil Regresi Uji Pemilihan Model Terbaik	57
Tabel 4.6	Hasil Regresi Metode <i>Random Effect Model</i>	58
Tabel 4.7	Persyaratan Uji Asumsi Klasik Regresi Data Panel	62
Tabel 4.8	Hasil Regresi Uji Multikonieritas	63
Tabel 4.9	Hasil Uji Heteroskedastisitas	63
Tabel 4.10	Hasil Uji F	64
Tabel 4.11	Hasil Uji T	65
Tabel 4.12	Intersep Per Provinsi di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rasio Gini Provinsi Papua Barat menurut Kabupaten/Kota 2016-2022 (Dalam Desimal).....	6
Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2022 (Dalam Persentase)	7
Gambar 2.1 Kurva Lorenz	15
Gambar 2.2 Lingkaran Setan Kemiskinan	21
Gambar 2.3 Kerangka Pikir	36
Gambar 4.1 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2016-2022	49
Gambar 4.2 Persentase Kemiskinan Provinsi Papua Barat Tahun 2016-2022.....	51
Gambar 4.3 Persentase Kemiskinan Provinsi Papua Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2022	52
Gambar 4.4 Persentase Kemiskinan Provinsi Papua Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2022	54
Gambar 4.5 Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2022	55
Gambar 4. 6 Hasil Uji Normalitas	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Regresi	81
Lampiran 2 Hasil Regresi Data Panel <i>Common Effect Model</i>	84
Lampiran 3 Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i>	85
Lampiran 4 Hasil Regresi Data Panel <i>Random Effect Model</i>	86
Lampiran 5 Hasil Uji Chow	87
Lampiran 6 Hasil Uji Hausman	88
Lampiran 7 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier (LM)</i>	89
Lampiran 8 Hasil Uji Normalitas	90
Lampiran 9 Hasil Uji Heterokedastisitas	91
Lampiran 10 Lampiran 10 Hasil Uji Multikolonieritas	91
Lampiran 11 Hasil Perhitungan Intersep REM	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan menjadi salah satu aspek penting yang ingin dicapai dan menjadi tujuan utama oleh setiap negara di dunia. Kesejahteraan ini mencakup beragam aspek seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, keadilan sosial, pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang memadai, dan akses terhadap layanan dasar. Salah satu elemen kunci yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah tingkat ketimpangan yang rendah. Ini berarti bahwa diperlukan peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata. Jika pendapatan meningkat, masyarakat dapat mengkonsumsi lebih banyak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wahyudi & Tiara, 2022).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terdiri dari ribuan pulau di dalamnya dengan keadaan dan potensi alam yang berbeda pada setiap daerah. Perbedaan ini dapat dilihat pada karakteristik alam, kondisi politik, masyarakat, sosial budaya, ekonomi, serta sumber daya alam yang berdistribusi beda pada setiap daerah sehingga dapat menyebabkan penghambatan dalam pemerataan pembangunan. Karena pada kenyataannya, terjadi ketidakmerataan kekayaan alam yang dimiliki oleh setiap provinsi. (Andhiani *et al.*, 2018). Maka, diperlukan kebijakan dan rencana dalam mengentaskan ketimpangan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dengan masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi masalah pada rendahnya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk mengatur urusan wilayahnya. Penyerahan berbagai kewenangan ini menjadi proses dalam desentralisasi yang perlu disertai adanya penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Pemerintah mengandalkan berbagai sumber pembiayaan untuk menjalankan kewenangan dan tanggung jawab daerah, sumber pembiayaan yang paling penting adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan komponen yang mencakup berbagai jenis pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah termasuk penerimaan dari pajak daerah. Kebijakan pemerintah untuk mengentaskan ketimpangan pendapatan dapat diwujudkan melalui pengalihan transfer sumber daya dari masyarakat yang berpendapatan tinggi kepada masyarakat yang berpendapatan rendah dengan diterapkan langsung melalui pembayaran pajak kepada pemerintah. Tujuan dari suatu perekonomian adalah dapat memberikan penghasilan yang merata bagi setiap anggota masyarakat, maka dari itu pajak yang masyarakat bayarkan diharapkan mampu membantu memperbaiki distribusi pendapatan.

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang lebih besar antara golongan dalam masyarakat tersebut. Ketimpangan pendapatan menurut Sukirno (2006), ini dapat diinterpretasikan sebagai perbedaan dalam kekayaan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin, yang terlihat dalam distribusi pendapatan masyarakat secara umum. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara. Ketidakseimbangan pendapatan terjadi karena pertumbuhan

ekonomi yang pesat tidak diikuti oleh pembangunan ekonomi yang merata di suatu daerah, yang menghasilkan disparitas pendapatan yang besar antara berbagai kelompok masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pembangunan yang sedang berlangsung belum mencapai standar kualitas yang diharapkan. Ketidakseimbangan pendapatan yang signifikan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi di sebuah negara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi, penegakkan hukum, disiplin fiskal, keterbukaan perdagangan internasional, serta strategi pengentasan kemiskinan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan (Ariesta *et al.*, 2022).

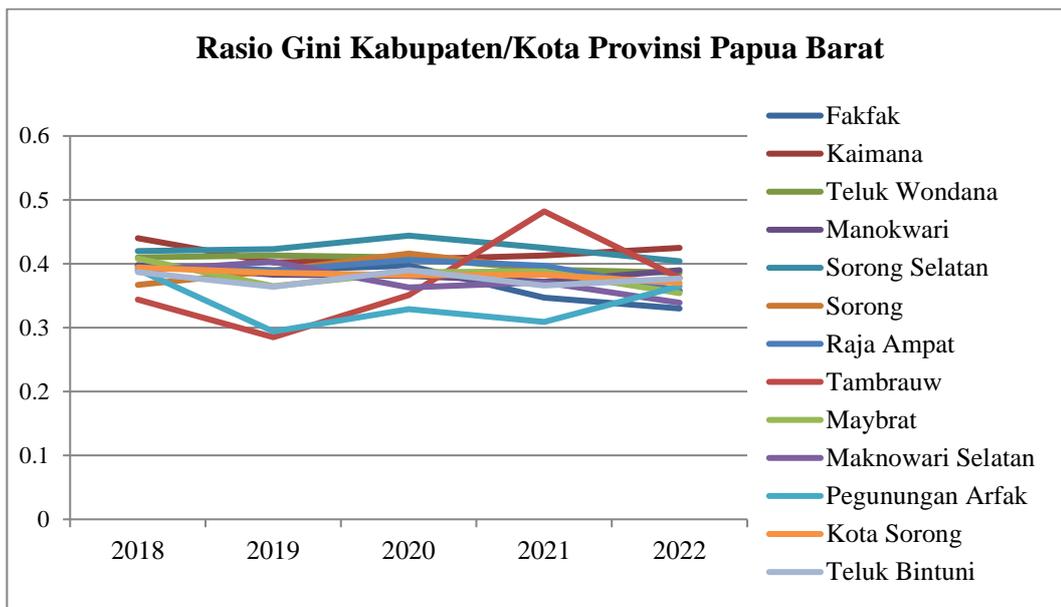
Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan utama dalam negeri yang memiliki jumlah persentase yang tinggi jika dibanding dengan sumber penerimaan lainnya. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jika suatu negara memiliki pendapatan pajak yang besar hal tersebut akan menciptakan lebih banyak pekerjaan sehingga pengangguran dapat berkurang dan fasilitas kesehatan dan pendidikan dapat lebih baik seperti halnya pada penelitian oleh Nusiantari & Swasito (2020) menyatakan bahwa pajak dapat menjadi alat untuk mendorong redistribusi pendapatan dan menekan ketimpangan pendapatan. Pajak dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Penerimaan pajak terbukti dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi melalui fungsi alokasi pajak, dimana pajak dialokasikan untuk pembelajaan yang mendukung produktivitas dan mengurangi ketimpangan pendapatan di suatu wilayah.

Selanjutnya, kemiskinan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Kemiskinan menjadi permasalahan yang serius dan mengakar yang harus dihadapi oleh negara setiap tahunnya. Menurut Vincent (2009), kemiskinan merupakan masalah yang kompleks bagi negara maju dan juga sedang berkembang, sehingga penanggulangannya membutuhkan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Hindun *et al.* (2019) menyatakan bahwa kemiskinan memiliki hubungan positif dengan ketimpangan pendapatan. Semakin tinggi kemiskinan, maka ketimpangan pendapatan juga semakin tinggi. Kemiskinan muncul ketika kebutuhan dasar seseorang tidak terpenuhi. Namun, ketika tingkat kemiskinan menurun, ini menandakan bahwa masyarakat telah berhasil memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini terjadi karena pendapatan yang diperoleh masyarakat meningkat. Dengan peningkatan pendapatan ini, perbedaan pendapatan antar individu menjadi lebih kecil, yang pada akhirnya mengurangi ketimpangan pendapatan.

Selain Penerimaan Pajak Daerah dan Kemiskinan, faktor jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Jumlah penduduk merujuk pada total individu yang tinggal di suatu wilayah negara. Dalam konteks tenaga kerja, penduduk suatu negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok usia kerja dan kelompok non-usia kerja. Penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia antara 10 hingga 65 tahun. Namun, saat ini batas usia kerja telah diubah menjadi antara 15 hingga 65 tahun (Gatiningsih dan Sutrisno, 2017). Jumlah penduduk dijelaskan sebagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan yang akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Hal

tersebut berarti jumlah penduduk yang tinggi dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan karena semakin banyak jumlah penduduk, semakin tinggi tingkat pengangguran yang dapat mempengaruhi PDRB per kapita yang rendah (Damanik *et al.*, 2018).

Provinsi Papua Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di ujung barat pulau Papua. Provinsi ini dimekarkan dari Provinsi Papua pada tahun 2003, dengan penamaan awal Irian Jaya Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20017, nama Irian Jaya Barat diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat memiliki 12 kabupaten dan 1 kota, dengan Manokwari sebagai ibu kota provinsi. Terdapat kesenjangan antar wilayah di Provinsi Papua Barat, dimana wilayah pesisir memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedalaman. Selain itu, terdapat juga kesenjangan antara kota dan desa, dimana pendapatan per kapita di kota lebih tinggi dibandingkan dengan desa. Salah satu indikator untuk melihat ketimpangan pendapatan yaitu menggunakan Rasio Gini. Rasio Gini atau Indeks Gini adalah rasio yang digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah secara menyeluruh. Semakin mendekati nilai 1 maka ketimpangan di daerah tersebut tinggi, sebaliknya jika mendekati nilai 0 maka distribusi pendapatan di daerah tersebut baik dan merata. Berikut ini dilihat pada Gambar 1.1 Rasio Gini di kabupaten/kota pada Provinsi Papua Barat:

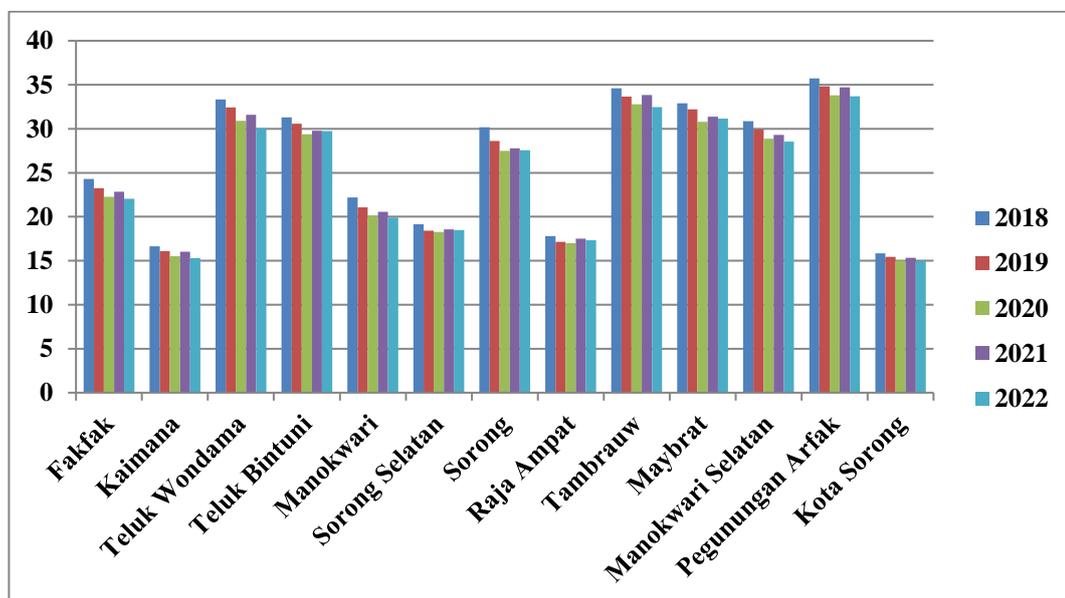


Gambar 1.1 Rasio Gini Provinsi Papua Barat menurut Kabupaten/Kota 2016-2022 (Dalam Desimal)

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Berdasarkan Gambar 1.1 pada data rasio gini setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, terdapat angka rasio gini berkisar diatas 0,3 hingga 0,5 yang artinya tergolong dalam ketimpangan kategori sedang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Papua Barat, tingkat ketimpangan pendapatan pada September 2022 yang diukur dengan rasio gini adalah sebesar 0,384 meningkat 0,014 dari rasio gini Maret 2022. Rasio Gini Papua Barat juga tercatat lebih rendah dari Nasional. Berdasarkan daerah, tingkat ketimpangan terendah berada pada Kota Sorong dengan gini rasio 0,2-0,3 sampai dengan tahun 2022, dan ketimpangan tertinggi berada pada kabupaten Kaimana dan Sorong Selatan dengan rasio gini 0,4 keatas. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan ini meliputi aksesibilitas antara pusat pertumbuhan di kabupaten/kota, keterbatasan jalan utama, kurangnya jaringan pusat produksi, fasilitas dan infrastruktur kebutuhan dasar yang terbatas seperti air bersih, listrik, dan telekomunikasi.

Kondisi geografis yang dimiliki oleh Provinsi Papua Barat sebagian besar wilayahnya berupa hutan dan pegunungan yang sulit diakses. Hal ini menyebabkan Hal ini menyebabkan sulitnya akses ke sumber daya dan infrastruktur, selain itu juga banyak potensi ekonomi yang besar seperti pertanian, perikanan, pertambangan, hasil hutan, dan pariwisata yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadi penyebab utama Provinsi Papua Barat masih memiliki kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dimana wilayah pedesaan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan dan juga pendapatan perkapita di kota lebih tinggi dibandingkan desa, sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah desa. Berikut ini dapat dilihat pada Gambar 1.2 persentase penduduk miskin di kabupaten/kota pada Provinsi Papua Barat:



Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2022 (Dalam Persentase)

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Berdasarkan Gambar 1.2 mengenai tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 sebesar 21,23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 21,84%. Kota Sorong memiliki persentase penduduk miskin paling rendah dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan terlihat seperti pada Gambar 1.2.

Pajak daerah dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan pendapatan. Diharapkan penerimaan pajak daerah akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan menciptakan lebih banyak pekerjaan, pengangguran dapat berkurang dan fasilitas kesehatan dan pendidikan dapat lebih baik sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Berikut ini dilihat pada Tabel 1.1 menunjukkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2018-2022 (Dalam Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Pajak Daerah Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Fakfak	6,29	7,42	6,37	7,01	9,07
Kaimana	7,76	6,25	5,27	5,89	6,42
Teluk Wondama	4,1	5,25	5,28	4,09	1,15
Teluk Bintuni	24,25	37,47	53,79	50,31	56,3
Manokwari	45,32	50,98	41,01	52,91	57,3
Sorong Selatan	1,4	1,18	1,03	1,41	1,52
Sorong	12,15	14,30	11,17	15,96	18,6
Raja Ampat	5,76	8,30	3,80	2,84	3,52
Tambrauw	0,32	1,25	0,70	0,48	0,24
Maybrat	0,43	0,05	0,00	0,27	-
Manokwari Selatan	0,18	0,66	0,74	0,95	1,6
Pegunungan Arfak	-	0,66	0,08	0,36	0,23
Kota Sorong	47,59	52,43	43,79	56,63	53,53

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.1, pada kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Penerimaan Pajak Daerah selama 2018-2022 mengalami peningkatan pertumbuhan yang fluktuatif setiap tahunnya. Kota Sorong mendominasi persebaran daerah dengan memberikan penerimaan pajak sebesar 56,63 miliar rupiah sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Penerimaan pajak yang besar ini juga bersamaan ketimpangan pendapatan di Kota Sorong yang rendah dengan indeks gini 0,2 sampai 0,3 sampai tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak daerah di Kota Sorong dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

Papua Barat memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan dengan wilayahnya yang sangat luas. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Papua Barat sekitar 1.134.068 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 11 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk yang sedikit dan tersebar

di wilayah yang luas menyebabkan ketimpangan pendapatan di daerah ini. Penduduk berpendapatan rendah sedikit menyerap hasil pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah fokus pada kebijakan pembangunan di Papua untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Berikut ini dilihat pada Tabel 1.2 Jumlah Penduduk di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat:

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2018-2022 (Dalam Ribu Jiwa)

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat (Ribu Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Fakfak	77.381	78.686	85.197	85.817	86.282
Kaimana	58.404	60.216	62.256	62.957	83.833
Teluk Wondama	31.769	32.521	41.644	42.609	43.746
Teluk Bintuni	63.091	64.406	87.083	89.418	92.236
Manokwari	170.897	177.346	192.663	194.905	197.097
Sorong Selatan	46.021	46.922	52.469	53.167	53.884
Sorong	86.994	88.927	118.679	121.963	125.949
Raja Ampat	47.885	48.493	61.141	65.403	66.839
Tambrau	13.804	13.879	28.379	31.385	35.742
Maybrat	40.102	40.899	42.991	43.364	43.681
Manokwari Selatan	23.617	24.220	35.949	37.149	38.648
Pegunungan Arfak	30.409	28.808	38.207	38.936	39.760
Kota Sorong	247.084	254.294	284.410	289.767	295.809

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa terus terjadi peningkatan jumlah penduduk pada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dari tahun 2018-2022. Jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2022 ditempati oleh Kota Sorong dengan 295.809 jiwa, lalu Kabupaten Manokwari dengan 197.097 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah tercatat di Kabupaten Tambrau sebesar 35.742 jiwa. Papua barat menjadi provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sedikit, ini

dikarenakan kondisi geografis Papua Barat yang sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan dan pegunungan yang sulit diakses sehingga sebagian besar wilayah Papua Barat ini jarang dihuni oleh manusia.

Berdasarkan data Penerimaan Pajak Daerah, Kemiskinan, Jumlah Penduduk, pada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat yang mengalami peningkatan yang baik setiap tahun, namun kenyataannya tidak menjanjikan ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan secara signifikan juga peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Jumlah Penduduk, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerimaan Pajak Daerah, Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerimaan Pajak Daerah, Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan tambahan informasi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi bagi akademisi, serta menjadi referensi penelitian-penelitian

selanjutnya yang berhubungan dengan masalah penerimaan pajak daerah, jumlah penduduk, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Penelitian ini diharapkan bisa melengkapi kajian-kajian mengenai Ketimpangan Pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi kepada peneliti maupun pembaca pada khususnya terkait dengan Penerimaan Pajak Daerah, Kemiskinan, Jumlah Penduduk, terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat yang kemudian dapat dijadikan rujukan pada penelitian selanjutnya.
2. Bagi Pemerintah daerah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak pemerintah daerah Kabupaten/Kota Papua Barat dalam mengambil kebijakan-kebijakan di bidang pembangunan daerah, terutama pada ketimpangan pendapatan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat daerah Provinsi Papua Barat dan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2023. Diakses di <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2022&provinsi=32&pemda=->
- Badan Pusat Statistik. (2023). Diakses di Bps.go.id. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. *Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota (2016-2022)* <https://papuabarat.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. *Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (persen), (2016-2022)* <https://papuabarat.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. *Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (persen), (2016-2022)* <https://papuabarat.bps.go.id>
- BPS Provinsi Papua Barat. (2024). Bps.go.id. <https://papuabarat.bps.go.id/site/resultTab>
- BPS Provinsi Papua Barat. (2023). Bps.go.id. <https://papuabarat.bps.go.id/publication/2023/02/28/1675aaebd5ba59b4d6e1cdd3/provinsi-papua-barat-dalam-angka-2023.html>
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. (2021). *Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2021 Provinsi Papua Barat*. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/tw1_2021/32_Papua Barat_Twi_2021.pdf
- Andhiani, K. D., Erfit, E., & Bhakti, A. (2018). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 26–34. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4602>
- Apriesta, L. F. (2013). Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus : Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 1–12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/1916>
- Arafah, M., & Khoirudin, R. (2022). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 628. <https://doi.org/10.20527/jiep.v5i2.6408>
- Ariesta, L. C. O. W., Jamzani Sodik, & Didi Nuryadin. (2022). Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Dan Keterkaitan Spasial. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 737–754. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.79>

- Arsyad, L. (1999). *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi (BPFE).
- Baransano, M. R., Koleangan, R. A. M., & Niode, A. O. (2020). Analisis Potensi Pendapatan Sektoral Ekonomi di Kabupaten Teluk Wondama. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(02), 47–57.
- Brian-vincent. (2009). *The Concept 'Poverty' towards Understanding in the Context of Developing Countries 'Poverty qua Poverty': with Some Comparative Evidence on Britain*. 3–13.
- Daas, Y. (2019). *Poverty: A Structural Perspective Poverty: A Structural Perspective By Yousuf Daas - Ku Leuven Aug - 2018 Poverty: A Structural Perspective. August 2018*.
- Damanik, A. M., Zulgani, Z., & Rosmeli, R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 15–25. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4533>
- Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter, S. G. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.
- Darmawan, A. A., & Susanto, S. E. (2021). *Kesenjangan Sosial Indonesia: Kemiskinan Struktural dan Efek Pandemi*. Medium,Com. <https://pantau-ekonomi.medium.com/kesenjangan-sosial-indonesia-kemiskinan-struktural-dan-efek-pandemi-f69b94ea0715>
- Ersad, M. E., Amir, A., & Zulgani, Z. (2022). Dampak IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(2), 425–438. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i2.15614>
- FAHMI, A. (2019). *Keterkaitan Antara Penerimaan Pajak Penghasilan Dan Pbb Terhadap Kesenjangan Pendapatan*. 6(1), 39. <https://doi.org/10.30656/jak.v6i1.945>
- Fulgsang, S. (2013). *Determinant of Income Inequality: Sub-Saharan Perspective. Thesis*.
- Gatiningsih dan Sutrisno, E. (2017). Kependudukan dan ketenagakerjaan. In *Modul mata kuliah*. http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku_GATI_dan_EKO_Kependudukan_Lengkap.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic Econometric. In *McGraw-Hill/Irwin*.
- Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(3), 250.

<https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>

- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan* (Cetakan Ed). APP AMP YPKN.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi Edisi keenam* (6th ed.). Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (ed.)). Penerbit Andi.
- Matitaputty, S. J., Sugiarto, A., Christy, A. A. M., & Hastuti, P. R. (2021). Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Perspektif Akuntansi*, 3(3), 253–269. <https://doi.org/10.24246/persi.v3i3.p253-269>
- Muharam, K. I. (2022). *Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2020*. 1(2), 284–294. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess>.
- Nusiantari, D., & Swasito, A. P. (2020). Peran Penerimaan Pajak Dalam Usaha Pemerataan Pendapatan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 3(1), 35–41. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i1.670>
- Mardiasmo, M. B. (2019). Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi Sektor Publik*, 3–8.
- Raziq, K., & El, N. (2023). *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss1.art2>
- Rohima, S. (2019). the Influence of Infrastructure, Poverty and Income on Food Security in South Sumatra Province. *AFEBI Economic and Finance Review*, 4(01), 26. <https://doi.org/10.47312/aefer.v4i01.214>
- Rosalitta, & Muljaningsih, S. (2022). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, angkatan kerja, dan perpajakan terhadap disparitas pendapatan di provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 116–125.
- Skonsen, M. (2015). *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern : Sejarah Pemikiran Ekonomi* (B. Santoso & T. Wibowo (eds.)). Prenadamedia Group.
- Sri Indriyani S Dai. (2023). *Analisis pengaruh rls, pengeluaran perkapita, uhh, dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kbi dan kti*. 6(1), 535–544.
- Sugiarti, I., & Erdkhadifa, R. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2021. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2427–2441. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3498>
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan* (Ed. 2). Kencana Prenada Media Group.

- Syamsi, I. (1994). *Dasar-dasar kebijaksanaan keuangan negara*. rineka cipta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). Economic Development. In *Pearson*.
<http://eco.eco.basu.ac.ir/BasuContentFiles/57/57304a77-1269-4081-bd5b-4c66b84b06a4.pdf>
- Wahyudi, H., & Tiara, A. (2022). Ketimpangan Pendapatan Penyebab Tidak Bahagia. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(2), 125–138.
<https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i2.1419>
- Wahyuni, S., & Andriyani, D. (2022). Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhanekonomi Terhadapketimpangan Pendapatan Diprovinsiaceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 5(1), 39.
<https://doi.org/10.29103/jeru.v5i1.7919>
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2017). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah* (Cetakan ke). Deepublish.
- Harjana, L. I. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2).
- Putra, H. P., Diaudin, M., Fahrudin, R., & Suwanan, A. F. (2022). Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Gini Ratio Dan Pertumbuhan Pdrb Perkapita Terhadap Angka Kemiskinan Di Kota Blitar Tahun 2011-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 18(2), 152–161